

**PROPOSAL
PENELITIAN**



**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN
KOMITMEN ORGANISASI DAN TRANSPARASI KEBIJAKAN
PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERATING.
(Studi Kasus Pada Kantor DPRD dan Kabupaten Solok)**

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

TIM PENGUSUL:

**Juita Sukraini, SE. M.Si / 1017116201/Ketua
Siska Yulia Defitri, SE. M.Si/ 1023078301/ Anggota**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK
OKTOBER 2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Komitmen Organisasi Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderating. (Studi Pada Kantor DPRD Kota dan Kabupaten Solok)

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : Juita Sukraini, SE. M.Si

NIDN : 1017116201

Jabatan Fungsional : Lektor

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Nomor HP : 081374654590

Alamat surel (e-mail) : jjuitasukraini@gmail.com

Anggota Tim

Nama Lengkap : Siska Yulia Defitri, SE. M.Si

NIDN : 1023078301

Perguruan Tinggi : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Tahun Pelaksanaan : 2019/ 2020

Sumber Dana : Mandiri

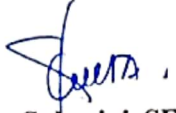
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 7.000.000,-

Biaya Keseluruhan : Rp. 7.000.000,- (Mandiri)

Solok, 7 Oktober 2019


Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi
(Juita Sukraini, SE. M. Si)
NIDN. 1017116201

Ketua,


(Juita Sukraini, SE. M. Si)
NIDN. 1017116201

Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY


(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM)
NIDN. 1019017402

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	1
1. PENDAHULUAN	2
2. TINJAUAN PUSTAKA1	6
3. METODE	10
4. JADWAL	19
5. DAFTAR PUSTAKA	20
LAMPIRAN	21

**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN
KOMITMEN ORGANISASI DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN
PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERATING.
(Studi Pada Kantor DPRD Kota dan Kabupaten Solok)**

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah; (2) Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah; (3) Apakah transparansi kebijakan publik dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.

Penelitian ini dilakukan pada Kantor DPRD Kota dan Kabupaten Solok. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik sampel yang digunakan adalah sampel jenuh dengan cara menyebar kuesioner.

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Berlakunya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah berimplikasi positif terhadap kedudukan, fungsi, dan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan diharapkan dapat lebih aktif dalam menangkap aspirasi dari masyarakat dan kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Otonomi daerah di Indonesia berlangsung sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 (Undang-Undang, 1999) yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (Undang-Undang, 2004a) tentang Pemerintah Daerah, dilanjutkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 (Undang-Undang, 2004a) tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 (Undang-Undang, 2004b) tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 (Undang-Undang, 2014) semakin menguatkan pelaksanaan sistem pembangunan yang semula bersifat otonomi pusat menjadi otonomi daerah.

Terjadinya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah mengakibatkan pemerintah daerah diberi keleluasaan dan wewenang untuk

meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahannya. Dampak dari berlakunya otonomi daerah memberikan efek positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang muncul dalam masyarakat. Sehingga dengan adanya otonomi daerah dapat tercipta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah. Peningkatan kualitas pelayanan umum demi kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keterlibatan masyarakat yang ikut andil dan berpartisipasi dalam proses pembangunan daerahnya. Terkait dengan itu pemerintah berupaya mewujudkan keseimbangan antara kemampuan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lain guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 (Peraturan Pemerintah, 2005b) tentang pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132, menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan pengawasan pada pelaksanaan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Menurut (Permatasari, 2019) kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi dalam proses penyusunan kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan Permatasari (2019) menyimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan.

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Utama, 2015). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Menurut Prasetya (2014) menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Dengan memperhatikan pentingnya pengetahuan anggota dewan dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah, seperti yang telah diteliti oleh (Prasetya, 2014; Safitri & Sari, 2018) maka fenomena yang sama juga akan terjadi pada berbagai kabupaten dan kota di daerah yang berbeda.

Dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan APBD anggota DPRD selaku pengawas APBD harus memiliki komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan hal yang cukup penting yang harus dimiliki oleh anggota DPRD. Komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai tujuan organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan kuat.

untuk menjadi bagian dari organisasi kerja tersebut. Anggota dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran menjadi relatif lebih tepat dan baik (Astuti, 2015). Oleh sebab itu, penelitian ini akan membuktikan seberapa penting komitmen organisasi bagi anggota dewan tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD. Pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasikan segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih

tepat dan efisien. Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran merupakan pengetahuan anggota DPRD mengenai pengelolaan APBD dan prinsip-prinsip APBD mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan juga mendukung dalam fungsi pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pengawasan adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan dan diantaranya adalah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Transparansi dapat diartikan sebagai pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Transparansi kebijakan publik berarti adanya akses bagi warga masyarakat untuk dapat mengetahui proses dari anggaran serta kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat (Utama, 2015).

Transparansi kebijakan pun sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh orang-orang yang berkepentingan. Informasi tersebut harus memadai agar dapat dimengerti dan di pantau oleh orang-orang yang membutuhkan informasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka judul yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah **“Efek Pengawasan Keuangan Daerah Dimoderating Oleh Komitmen Organisasi Dan Transparansi Kebijakan Publik”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah dari judul yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.
2. Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.

3. Apakah transparansi kebijakan publik dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui transparansi kebijakan publik dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengetahuan Anggaran

Didalam definisi anggaran terdapat beberapa menurut para ahli antara lain sebagai berikut :

1. Sasongko dan Parulian (2015;2), “Anggaran adalah rencana kegiatan yang dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran di antaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan”.
2. Suharsimi (2010;1), “Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang”.
3. Nafarin (2013;11), mendefinisikan bahwa “Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dalam satuan barang/jasa”.

Berdasarkan pengertian diatas maka anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun secara sistematis yang dinyatakan dalam satuan uang, barang atau jasa untuk waktu periode yang akan datang.

2.2 Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan pada dasarnya mengacu kepada tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak luar eksekutif yaitu masyarakat dan DPRD dalam mengawasi kinerja Pemerintahan. Berikut beberapa definisi pengawasan menurut beberapa para ahli yaitu :

1. Halim dan Iqbal (2012;37) “secara umum pengawasan adalah sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi”.
2. Saydam dalam Kadarisman (2012;187) menjelaskan bahwa “Pengawasan merupakan kegiatan manajerial, dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan karyawan. Para karyawan yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan lebih sedikit dibandingkan dengan karyawan yang tidak memperoleh bimbingan”.
3. Soni Sumarsono (2010;32) mengemukakan bahwa “Pengawasan adalah segala kegiatan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan yang telah digariskan”.

Sehingga pengawasan keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam upaya untuk menjamin suatu kegiatan terlaksananya sesuai dengan rencana yang ingin dicapai.

2.3 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja yang dalam hal ini individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai yang ingin dicapai dalam organisasi kerja serta adanya Komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja yang dalam hal ini individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai yang ingin dicapai dalam organisasi kerja serta adanya

kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi kerja tersebut (Permatasari, 2019).

Komitmen organisasi sering diartikan secara individu dan berhubungan dengan keterlibatan orang tersebut pada organisasi yang bersangkutan. Komitmen organisasi merupakan salah satu sikap yang mencerminkan perasaan suka atau tidak suka seorang pegawai terhadap tempat pegawai yang bersangkutan bekerja (Pratiwi, 2016).

Tiga karakteristik digunakan sebagai pedoman dalam mengimplementasikan komitmen organisasi (Gunawan, Haming, Zakaria, & Djamareng, 2017), yaitu:

1. Keyakinan kuat tentang organisasi.
2. Untuk mempertahankan diri agar tetap menjadi anggota organisasi
3. berusaha sebagai bagian dari organisasi anggota.

Komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan identifikasi dan keterikatan individu terhadap organisasi itu sendiri dan dalam pengertian lain komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan kekuatan hubungan antara karyawan dan organisasi (Bachmid & Ak, 2018).

Berikut tiga karakteristik yang berhubungan dengan komitmen organisasi menurut Lubis (2010;19) :

1. Keyakinan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai dan tujuan organisasi.
2. Kemauan untuk sekuat tenaga melakukan yang diperlukan untuk kepentingan organisasi.
3. Keinginan yang kuat untuk menjaga keanggotaan dalam organisasi.

Identifikasi terbentuk dalam kepercayaan anggota terhadap organisasi, dapat dilakukan dengan memodifikasi tujuan organisasi, sehingga mencakup beberapa tujuan pribadi para anggota atau dengan kata lain organisasi memasukkan pula kebutuhan dan keinginan anggota dengan organisasi. Keterlibatan atau partisipasi anggota dalam aktivitas-aktivitas kerja penting untuk diperhatikan karena adanya keterlibatan anggota menyebabkan mereka akan mau dan senang bekerja sama dengan anggota yang lain. Salah satu cara yang dapat memancing keterlibatan anggota adalah dengan

mamancing partisipasi mereka dalam berbagai kesempatan pengambilan keputusan, yang dapat menumbuhkan keyakinan pada anggota bahwa apa yang telah diputuskan adalah merupakan keputusan bersama. Disamping itu, dengan melakukan hal tersebut maka anggota merasakan bahwa mereka diterima sebagai bagian yang utuh dari organisasi, dan konsekuensi lebih lanjut, mereka merasa wajib untuk melaksanakan bersama apa yang telah diputuskan karena adanya rasa keterikatan dengan apa yang mereka ciptakan.

2.4 Transparansi Kebijakan publik

Transparansi kebijakan publik adalah persepsi responden tentang adanya keterbukaan mengenai anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, pemerintah selaku perumus dan pelaksanaan kebijakan APBD berkewajiban untuk terbuka dan bertanggungjawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan (Setyawati, 2010).

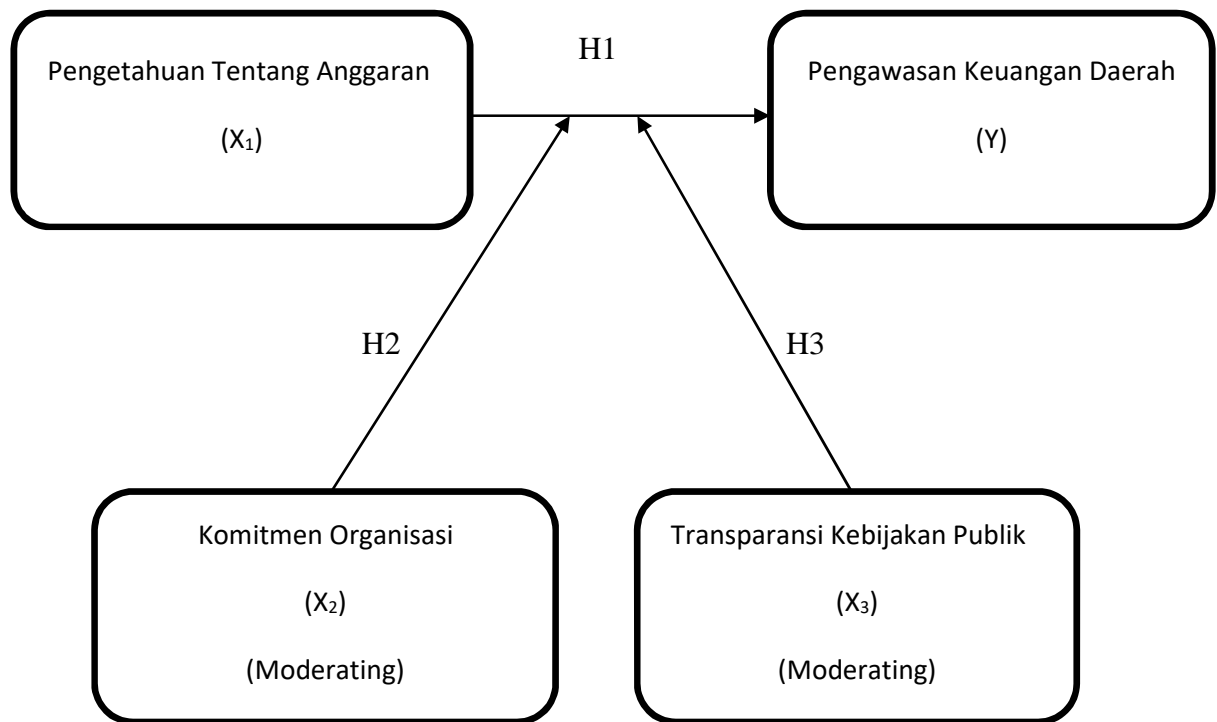
Pada Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 (Peraturan Pemerintah, 2005b) tentang Manajemen Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan publik untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas mungkin tentang keuangan daerah. Peraturan pemerintah menjadi salah satu dari undang-undang dasar no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh oleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya rendah, dan cara sederhana (Adriana & Ritonga, 2018) .

Transparansi suatu badan publik, yang dapat berupa dipahami sebagai kemudahan pengungkapan dan akses ke Internet perolehan informasi keuangan lokal (Annisa & Murtini, 2018). Sistem Informasi Keuangan Daerah tersebut dimaksudkan sebagai serangkaian proses dan prosedur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah.

2.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, dapat

digambarkan pada gambar 2.1 sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan kedalam penelitian empiris (*empirical research*), yakni penelitian yang dilakukan terhadap fakta-fakta empiris yang didapatkan dari observasi atau pengalaman, serta bersifat kuantitatif yang menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pengaruh fenomena yang dijadikan objek penelitian (Safitri & Sari, 2018). Penelitian ini menggunakan Pendekatan Asosiatif. Pendekatan asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Oleh karena itu penelitian ini mengutamakan penelitian terhadap data dan fakta empiris dengan menggunakan sumber data primer (kuesioner).

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2010;31) “Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Besarnya populasi yang akan digunakan dalam suatu

penelitian tergantung pada jangkauan kesimpulan yang dibuat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota dan Kabupaten Solok periode 2019 sampai dengan periode 2024.

Sampel merupakan suatu bagian dari populasi yang akan diteliti yang dianggap dapat menggambarkan populasinya. Penelitian ini menggunakan teknik total sampling. Dimana pengambilan sampel didasarkan jumlah total populasi atau sampel yang ada yaitu seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2019 sampai dengan periode 2024. Alasan dipilihnya sampel tersebut adalah karena seluruh anggota DPRD Kota dan Kabupaten Solok terlibat dalam proses pengawasan keuangan daerah (APBD) yaitu pada saat pelaksanaan APBD hingga pertanggungjawaban APBD. Selain itu, alasannya seluruh anggota DPRD Kota dan Kabupaten Solok dijadikan responden adalah untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih valid atau tidak bisa. Hal ini karena suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut Ghozali (2011;32).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data penelitian yang dibutuhkan adalah data primer dalam bentuk persepsi responden melalui pendistribusian secara langsung kepada anggota DPRD periode 2019 sampai dengan periode 2024 di Kota dan Kabupaten Solok.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu survai dengan cara memberikan kuesioner kepada seluruh anggota DPRD Kota dan Kabupaten Solok. Untuk dapat dihitung secara statistik, perlu diubah dengan skor kuantitatif yaitu dengan memberikan skor untuk setiap jawaban dengan menggunakan *skala likert 5* poin dari yang tertinggi hingga terendah.

Skala Likert dengan kategori skor :

1. Kategori Sangat Setuju (SS) skor 5
2. Kategori Setuju (S) skor 4
3. Kategori Tidak Tahu (TT) skor 3
4. Kategori Tidak Setuju (TS) skor 2

5. Kategori Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.3
Definisi operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala pengukuran
1.	Pengetahuan Tentang Anggaran (X ₁)	Mengetahui tentang anggaran dan kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran, mendeteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran. (Jois, 2017)	1. Mengetahui tata cara pelaksanaan APBD. 2. Memiliki pemahaman tentang penyusunan APBD berdasarkan peraturan yang terkait. 3. Mendeteksi, serta mengidentifikasi pemborosan, kegagalan atau kebocoran anggaran. (Jois, 2017)	Likert
2.	Komitmen Organisasi (X ₂)	Sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja yang dalam hal ini individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai yang ingin dicapai dalam organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi kerja tersebut. (Permatasari,	1. Rasa mengidentifikasi dengan tujuan organisasi. 2. Rasa keterlibatan dengan tugas organisasi dan profesi. 3. Rasa kesetiaan pada organisasi atau suatu keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi atau profesi. (Pratama, 2016)	Likert

		2019)		
3.	Transparansi Kebijakan Publik (X ₃)	Transparansi kebijakan publik adalah persepsi responden tentang adanya keterbukaan mengenai anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. (Jois, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada akses informasi kepada masyarakat terhadap transparansi anggaran. 2. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagai keputusan yang mempunyai tujuan tertentu. (Jois, 2017)	Likert
4.	Pengawasan Keuangan Daerah. (Y)	Pengawasan diperlukan pada setiap tahap, dikarenakan Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. (Jois, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan saat penyusunan 2. Pengawasan saat pengesahan 3. Pengawasan saat pelaksanaan 4. Pengawasan saat pertanggung jawaban anggaran. (Jois, 2017)	

3.1 Metode Analisis Data

3.6.1. Uji Instrumen

Uji instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas sebagai berikut :

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur relevan atau tidaknya pengukuran dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner, Ghozali(2018;51). Untuk menguji apakah masing-masing indikator valid atau tidak, apabila mempunyai nilai r_{hitung} (*Pearson Correlation*) lebih besar dari r_{tabel} dapat disimpulkan semua indikator valid dengan *degree of freedom* (df) r_{tabel} pada taraf signifikan 0,05 (5%). Ketentuan menghitung r_{tabel} $df = n-2$ dengan uji dua sisi, Ghozali (2018;52).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,60$ dalam Ghozali,(2011;35). Hasil pengujian reliabilitas pada penelitian ini seluruh item pertanyaan dari semua variabel adalah reliabel. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *cronbach alpha* dari masing-masing variabel bernilai lebih dari 0,60.

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini ialah uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, antara lain sebagai berikut :

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai

distribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam deteksi normalitas, Ghozali (2011;35) yaitu :

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2011;36), uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas, model yang baik seharusnya tidak terjadikorelasi yang tinggi antara variabel bebas. Uji multikolonieritas ini dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Nilai *Tolerance* $>0,10$ dan *VIF* <10 .

- a. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai *VIF* <10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.
- b. Jika nilai *tolerance* $<0,10$ dan nilai *VIF* >10 , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedatisitas

Uji heterokedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Maka model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali (2011;37).

Dasar analisis untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan *scatterplot* yaitu :

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu, yang teratur dan bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.3. Analisis Regresi Linear Sederhana

Persamaan analisis regresi sederhana dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + e$$

Keterangan :

- Y : Pengawasan Keuangan Daerah
a : Konstanta
b : Koefisien Regresi
X : Pengetahuan Tentang Anggaran
e : error

3.6.4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, Ghazali (2011;39). Uji ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai koefisien determinasi R^2 yang merupakan besaran non negatif. Besarnya nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu jika $r=0$ atau mendekati 0, maka hubungan antara dua variabel sangat lemah atau tidak ada hubungan sama sekali. Bila $r=+1$ atau mendekati 1 maka korelasi antara dua variabel dikatakan positif dan sangat kuat.

Nilai koefisien determinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah R square karena variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari dua variabel. Selain itu R square dianggap lebih baik karena nilai R square dapat naik dan turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model regresi.

3.6.5. Uji Hipotesis

Uji t (t-test)

Dalam buku Sugiyono (2012;84), uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang di uji pada tingkat signifikan 0,05 atau *degree of freedom* 5% dengan ketentuan $t_{tabel} df = (n-k)$ dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel.

Dengan tingkat signifikan 5% maka kriteria pengujian adalah sebagai

berikut :

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ nilai signifikannya < 0.05 artinya ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat , maka hipotesis diterima.
2. Jika $|t_{hitung}| < t_{tabel}$ nilai signifikannya $> 0,05$ artinya tidak ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat, maka hipotesis ditolak.

3.6.6.Persamaan Regresi Ganda Untuk Uji Interaksi

Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi dari regresi linear berganda, dimana persamaannya mengandung unsur interaksi perkalian dua atau lebih dari variabel independen. Analisis MRA menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sample dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator.

Dengan menggunakan *moderated regression analysis* ini, maka persamaan regresi penelitian ini adalah :

1. Persamaan regresi II

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1 \cdot X_2$$

2. Persamaan regresi III

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_3 + b_3X_1 \cdot X_3$$

Keterangan :

Y : Pengawasan Keuangan Daerah

a : Konstanta

b_1, b_2, b_3 : Kooefisien Regresi

- X1 : Pengetahuan Tentang Anggaran
- X2 : Komitmen Organisasi
- X3 : Transparansi Kebijakan Publik
- e : error

JADWAL

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penentuan topik penelitian												
2.	Perumusan masalah penelitian												
3.	Penulisan Proposal												
4.	Survey Awal												
5.	Memvalidasi Instrumen												
6.	Collected Data												
7.	Analisis Data												
8.	Pengujian Hipotesis												
9.	Penulisan laporan akhir												

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, A., & Ritonga, I. T. (2018). Analysis of Local Financial Management Transparency Based on Websites on Local Government in Java, *10*(1), 13–26.
- Annisa, R., & Murtini, H. (2018). The Determinant of Regional Financial Information Transparency on the Official Website of Local Government, *7*(1), 43–51. <https://doi.org/10.15294/aaj.v5i3.18213>
- Astuti, A. (2015). *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD)*.
- Bachmid, F. S., & Ak, M. (2018). The Effect Of Organizational Commitment And Internal Control On Quality Of Accounting Information, *16*(1), 85–92.
- Darma, J., Si, M., Hasibuan, A. F., Si, M., & Masalah, L. B. (2012). Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating, *4*, 49–58.
- Gunawan, H., Haming, M., Zakaria, J., & Djamareng, A. (2017). Effect of Organizational Commitment , Competence and Good Governance on Employees Performance and Quality Asset Management, *8*(1), 17–30.
- Jawadi, F., Basuki, H. P., & Effendy, L. (2016). The Effect Of Budget Goal Clarity , Organizational Commitment , Accounting Control , And Adherence To Laws On The Perception Of Government Performance Of Central Lombok Regency, *6*(1), 21–36. <https://doi.org/10.14414/tiar.v6i1.579>
- Jois, C. (2017). Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap

Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Moderating Di Kabupaten Nabire.

Keputusan Presiden, R. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (2001).

Kristina. (2012). *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Komitmen Organisasi Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderating.*

Lambajang, A. A. A., Saerang, D. P. E., & Morasa, J. (2014). Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran , Partisipasi Masyarakat , Transparansi Kebijakan Publik , Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wilayah Sulawesi Utara, 104–117.

Oktasari, R. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah(APBD) Di DPRD Kabupaten Karanganyer.*

Peraturan Pemerintah, R. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kaungan Daerah (2000).

Peraturan Pemerintah, R. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan (2005).

Peraturan Pemerintah, R. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58

- Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2005).
- Permatasari, D. D. (2019). Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderating Komitmen Organisasi , Akuntabilitas Publik , dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris pada DPRD Kota dan Kabupaten Blitar Periode Tahun 2014-2019).
- Prasetya, A. B. (2014). *Analisis Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating.*
- Pratama, M. A. P. (2016). *Pengaruh Komitmen Organisasional dan Displin Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening.*
- Pratiwi, T. S. (2016). *Pengaruh Pengetahuan Penganggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan APBD: Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi.*
- Rahmansyah. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD) Dengan Good Government Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada DPRD Kota/Kabupaten Ponog.*
- Safitri, L. A., & Sari, S. P. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah : Partisipasi Keterlibatan Masyarakat Sebagai Pemoderasi
- P, N. L. (2010). Agency Theory dalam Sektor Publik Indonesia, 85–94., VII(2), 6–26.
- Setyawati, Y. (2010). *Pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel*

- Pemoderasi (Study Empiris di Karesidenan Surakarta) Oleh : Yuni Setyawati.*
- Suharyo. (2019). The Effect of Accountability , Transparency , and Supervision on Budget Performance by Using The Concept of Value for Money in Regional Business Enterprises (BUMD) of Riau Province, *4*(2), 236–249. <https://doi.org/10.30927/ijpf.584834>
- Undang-Undang, R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (1999).
- Undang-Undang, R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (2004).
- Undang-Undang, R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan (2004).
- Undang-Undang, R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014).
- Utama, M. H. (2015). *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderating.*
- Wahyu, Y., & Hardani, E. (2018). Peranan BPK dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan, (September).



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

Surat Tugas

No. 07-10/ST-P/LP3M-UMMY/X-2019

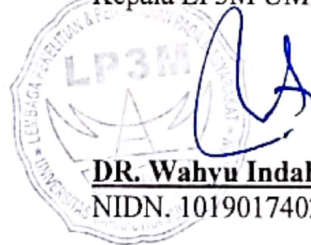
Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, dengan ini menugaskan kepada:

Nama : Juita Sukraini, SE. M.Si
NIDN : 1017116201
Pangkat/Golongan Ruang : Penata TK I/ IIIId
Prodi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Padang

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Komitmen Organisasi dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderating. (Studi Pada Kantor DPRD Kota dan Kabupaten Solok)”** pada Tahun Akademik 2019/2020.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Solok, 7 Oktober 2019
Kepala LP3M UMMY



DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM.
NIDN. 1019017402